

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

SKPD : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat
 PEKERJAAN : Pembangunan rabat beton desa sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar
 LOKASI : Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Biaya Pengadaan SMK3 Konstruksi					
	- Helm Pelindung (Safety Helmet)		5,00	bh	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)		5,00	psg	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00
	- Sepatu Keselamatan Proyek (Safety Shoes)		5,00	psg	Rp 182.000,00	Rp 910.000,00
	- Rompi Keselamatan (Safety vest)		5,00	bh	Rp 40.000,00	Rp 200.000,00
2	Uji Laboratorium		1,00	Ls	Rp 2.287.000,00	Rp 2.287.000,00
3	Mobilisasi Uji laboratorium		2,00	Ls	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00
4	Sewa Silinder		3,00	Ls	Rp 45.000,00	Rp 135.000,00
5	Uji Tekan Sampel		3,00	Ls	Rp 106.000,00	Rp 318.000,00
6	Papan Nama Proyek		1,00	Ls	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
7	Plakat Proyek		1,00	Ls	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00
					Jumlah I	Rp 5.400.000,00
II	PEKERJAAN RABAT BETON					
1	Pekerjaan Rabat Beton mutu f'c = 16,9 Mpa	A.4.1.1.6	109,30	m3	Rp 1.316.327,22	Rp 143.880.594,17
2	Pekerjaan Plastik Cor		728,70	m2	Rp 1.100,00	Rp 801.566,92
3	Pekerjaan Bekisting	A.4.1.1.18	54,65	m2	Rp 51.502,00	Rp 2.814.702,24
					Jumlah II	Rp 147.496.863,33

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBANGUNAN RABAT BETON DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO KAB. POLEWALI
MANDAR

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah :“Terwujudnya Perumahan dan kawasan Permukiman yang layak huni berkelanjutan menuju masyarakat mandiri dan sejahtera”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana di permukiman yang layak menunjang fungsi di permukiman
2. Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi permukiman
2. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan.
4. Memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan dilandasi legalitas hukum.

Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat selaku PenggunaJasa, akan melaksanakan Pekerjaan “ Pembangunan rabat beton desa sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali mandar.” Dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah disusun sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya pembangunan yang sesuai dengan kepentingan program Mewujudkan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.

Penyedia Jasa (Pelaksana) perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh agar Penyedia Jasa mampu menghasilkan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan.

B. MAKSUD, DASAR HUKUM DAN TUJUAN

I. MAKSUD

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan sebagai petunjuk bagi penyedia, pelaksana yang memerlukan masukan, keluaran, azas manfaat, kriteria dan proses yang harus dipenuhi pada saat proses

pelelangan maupun proses pelaksanaan pekerjaan baik secara fisik maupun secara administrasi. Dengan demikian diharapkan penyedia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar untuk menghasilkan keluaran serta hasil yang memiliki azas manfaat sebagaimana yang diharapkan.

II. Dasar Hukum

- a. UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- c. UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- e. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- g. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- j. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- k. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- l. Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- o. Keputusan Menteri PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi;
- p. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- q. SE Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- r. SE Menteri PUPR No. 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025;

- t. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
- u. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;
- v. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Saerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;

III. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan sebuah menghasilkan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak menunjang fungsi di pemukiman

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah menambah dan megoptimalkan prasarana dan sarana yang ada pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah untuk menunjang urusan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

D. LINGKUP KEGIATAN

Adapun Ruang Lingkup Pekerjaan Ini adalah :

- 1 Pekerjaan Persiapan
- 2 Pekerjaan Rabat Beton

E. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA :

Pengguna Jasa adalah : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Barat

Nama PA : Drs. Maddareski Salatin, M.Si

Alamat : Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat,
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju 91512

Nilai PAGU : Rp. 169.815.400 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)

Nilai HPS : Rp. 169.715.500,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Tahun Anggaran : 2025

F. SUMBER DANA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengadaan dibebankan APBD Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan yang akan diberikan kepada penyedia untuk memenuhi pekerjaan jasa konstruksi ini selama **60 (Enam Puluh)** Hari Kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pengguna Anggaran (PA), sedangkan Jangka Waktu Pemeliharaan pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh)** Hari Kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Surat Perjanjian/Kontrak.

H. METODE PEMILIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

Metode Pemilihan

- a) Metode yang akan digunakan untuk menentukan penyedia jasa adalah dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- b) Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan

c) Cara Pembayaran

Diberikan Uang muka sebesar 50% dari harga SPK dengan syarat melaporkan JMF/JMD dari UPTD Laboratorium dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dan melampirkan rincian penggunaan uang muka yang disetujui oleh Penggunaan Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

Sisa pembayaran dibayarkan setelah dilakukan Mutual Chek 100% atau MC 100 dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan

J. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi berupa :

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha **Berbasis Resiko** di bidang Jasa Konstruksi yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan **KBLI 42101** jenis **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan**
 - Sertifikat standar terverifikasi:
 - dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana di maksud pada poin diatas), belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi
- b. Peserta kualifikasi harus memiliki **Sertifikat Badan Usaha** (SBU) Kualifikasi **Usaha Kecil** serta disyaratkan sub bidang klasifikasi **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001)** yang masih berlaku sesuai peraturan;
- c. Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak untuk tahun pajak 2024;;
- d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (apabila ada perubahan);
- e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- f. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

SKP= 5-P, dimana P adalah Paket Pekerjaan yang sedang dikerjakan

- g. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bagi badan usaha yang terdaftar dalam Surat Gubernur Sulawesi Barat .

K. PERSONIL INTI DAN PERALATAN UTAMA

Tenaga Teknis/Terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan Pekerjaan ini kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No .	Posisi	Kualifikasi			Jumlah
		Pendidikan Minimal	Keahlian / Sertifikasi Minimal	Pengalaman Profesional Minimal	
	Personil Inti				
1	Pelaksana	(SMA /SMK)	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 4 (SKKNI 373-2013)	2 Tahun	1 orang
2	Keselamatan Kerja	(SMA/SMK) Semua Jurusan	SKK Petugas Keselamatan dan Kesehataan Kerja (K3) Kontruksi Jenjang 3 (SKKNI	1 Tahun	1 orang

Daftar Peralatan Utama minimal yang harus disediakan untuk pekerjaan ini terdiri dari :

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.	Concrete Mixer	Minimal 0,35 m ³	1 Unit

L. IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, calon pihak Penyedia Jasa harus menyediakan program Rencana Keselamatan Kerja (RKK) secara lengkap dan membuat Pernyataan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bersifat membahayakan sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi : Rendah

Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya yang terjadi adalah sebagai berikut :

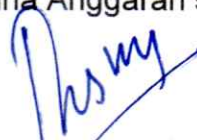
No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)
1	Galian dan Pengecoran	1. Terluka karena alat kerja; 2. Hasil galian berhamburan dan masuk ke mata.	3	1	3	Kecil

M. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku maka segala sesuatu yang termaksud di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diteliti dan ditinjau kembali.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam KAK ini, jika dianggap perlu akan ditetapkan kemudian.
3. Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mamuju, 11 Juli 2025

Pengguna Anggaran selaku PPK



Drs. Maddareski Salatin, M.Si f
Pembina Utama Madya/IV.d
Nip.19711214 199202 1 001

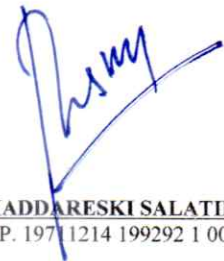
**REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

SKPD : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat
PEKERJAAN : Pembangunan rabat beton desa sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar
LOKASI : Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	JENIS PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 5.400.000,00
II	PEKERJAAN RABAT BETON	Rp. 147.496.863,33
Real Cost		Rp. 152.896.863,33
PPN 11%		Rp. 16.818.654,97
Total Biaya		Rp. 169.715.518,29
Dibulatkan		Rp. 169.715.500,00
Terbilang :		
SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH.		

Mamuju, 11 Juli 2025

Dibuat oleh :
PENGUNA ANGGARAN SELAKU PPK



DRS. MADDARESKI SALATIN M.SI
NIP. 19711214 199292 1 001

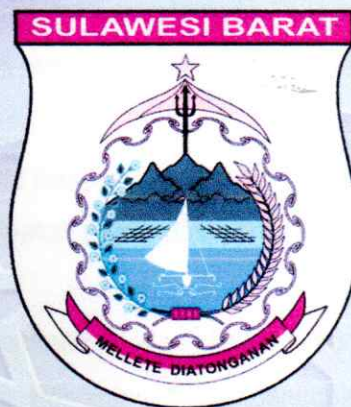


**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

*Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Komp. Kantor Gubernur Sulbar Jl. H.Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju*

KERANGKA ACUAN KERJA

**PEMBANGUNAN RABAT BETON DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO
KAB. POLEWALI MANDAR**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

TAHUN ANGGARAN

2025